

**PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD*
PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Faiz Faidhurrahman

NIM: 2111760012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2023**

LEMBAR PERYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN FAS Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila Di Kemudian Hari Di Temukan Seluruh Atau Sebagian Tesis Ini Bukan Hasil Karya Sendiri Atau Adanya Pelagiat Dalam Bagian-Bagian Tertentu, Saya Bersedia Menerima Sanksi Pencabutan Gelar Akademik Yang Saya Sandang Dan Sanksi-Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Bengkulu, 19 Februari 2024




Faiz Faidhurrahman




**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 196405311991031001


Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIP. 197406182009011004

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIP. 197406182009011004

Nama : Faiz Faidhurrahman
NIM : 2111760012
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:
"PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Penulis
FAIZ FAIDHURRAHMAN
NIM. 2111760012

Dipertahankan di depan penguji ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Desember 2023.

No	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Ismail Jalili, M.A (Ketua)	19/2 2024	
2	Dr. Alimni, M.Pd (Sekretaris)	19/2 2024	
3	Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum (Anggota)	19/2 2024	
4	Dr. H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Anggota)		

Mengetahui,
Rektor
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

Bengkulu, 16 Februari 2024
Direktur Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,



Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

NIP : 196503071989031005

Jabatan : Wakil Direktur Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* terhadap tesis mahasiswa di bawah ini:

Nama : Faiz Faidhurrahman

NIM : 2111750012

Program Studi : S2-Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum di Indonesia
Perspektif Fiqih Siyasah

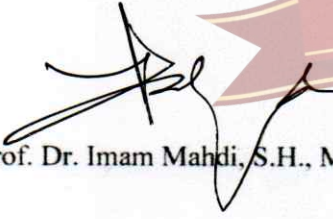
Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 16%. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan ditinjau ulang kembali.

Bengkulu 02 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Verifikasi

Verifikator


Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H


Haryono, M.Pd

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝ (محمّد/٤٧ : ٧)

7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

(Muhammad/47:7)

حَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

Katakanlah yang benar itu, walaupun ia pahit.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan *Parliamentary Threshold* pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*.” Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Zurkarnain, M.A selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang sekaligus menjadi pembimbing pertama yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ismail Jalili, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang sekaligus menjadi pembimbing kedua, yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.

4. Teruntuk kepada kedua orang tuaku, terima kasih atas dukungannya secara penuh dalam menyelesaikan studi Strata 2 (S2) ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kalian semua.
5. Kepada istriku, terima kasih atas semua yang sudah dilakukan untuk membantu suamimu ini dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah menjadikan kita keluarga yang *samara*.
6. Saudara, kerabat dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt. dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

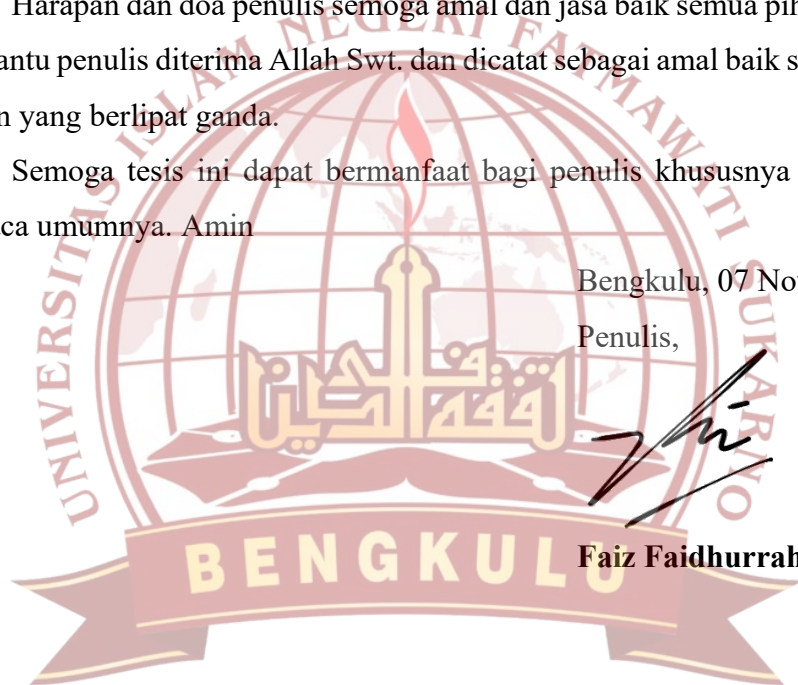
Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, 07 November 2023

Penulis,



Faiz Faidhurrahman



DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
TAJRID	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Partai Politik.....	16
1. Peran dan Fungsi Partai Politik.....	18
2. Tujuan Partai Politik	22
3. Asas – Asas dalam Partai Politik di Indonesia	23
B. Sistem Kepartaian	23
1. Sistem Kepartaian di Indonesia	26
C. Sistem Pemilihan Umum	32
1. Sistem Distrik (<i>Plurality/Majority</i>)	35
2. Sistem Proporsional	39
D. Fiqih Siyasah.....	46
E. Objek Kajian Fiqih Siyasah	48
F. Metode Pembahasan Fiqih Siyasah.....	51
G. Prinsip Fiqih Siyasah	55

1. Prinsip dari Qur'an.....	57
2. Prinsip dari Hadist	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	73
A. Bentuk Penelitian	73
B. Metode Penelitian.....	73
C. Jenis Data	74
D. Jenis Bahan Hukum	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
F. Teknik Analisa Data.....	75
BAB IV PEMBAHASAN.....	76
A. Konseptualisasi dan Dinamika Penerapan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>)	76
1. Penyederhanaan Partai Politik	76
2. Dinamika Penerapan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>).....	84
B. Penerapan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) ditinjau dari <i>Fiqh Siyasa</i>	101
1. Pengambilan Keputusan tanpa Alasan yang Tepat.....	101
2. Membuang Suara Sama dengan Membuang Kesaksian	103
3. Mengabaikan Hak-Hak Asasi Rakyat dalam Demokrasi	104
4. Membatasi Golongan dan/atau Kelompok Minoritas.....	106
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Partai Politik Tidak Lolos Persyaratan sebagai Peserta Pemilu	81
Tabel II.2 Daftar Beberapa Negara yang Menerapkan <i>Electoral Threshold</i>	84
Tabel II.3 Alokasi Kursi Versi Kuota Hare	43
Tabel II.4 Alokasi Kursi Versi Kuota Droop	44
Tabel II.5 Alokasi Kursi Versi D'Hont.....	45
Tabel II.6 Alokasi Kursi Versi Modifikasi Sainte Lague	46
Tabel IV.1 <i>Timeline</i> Perubahan Undang - undang Pemilihan Umum Terkait <i>Parliamentary Threshold</i>	87
Tabel IV.2. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2019	98



ABSTRAK

PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Penulis:

FAIZ FAIDHURRAHMAN

NIM 2111760012

Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Rohimin Alwi, M.Ag
2. Dr. Ismail Jalili, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penerapan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum di Indonesia menggunakan perspektif *fiqih siyasah*. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah ambang batas suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk menempatkan perwakilannya di parlemen. Fiqih Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara dengan nuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan preskriptif. Sumber data adalah data sekunder yang berarti data didapat melalui peninjauan literatur, undang - undang, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian. Data di analisa dengan teknik interpretasi mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa ambang batas parlemen tidak mendukung semangat persatuan dan keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, dan menciptakan suatu kondisi di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dari daerahnya tidak bisa menjadi representatif dari daerahnya. Ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, dan terkait dengan kepentingan partai besar untuk mencegah partai-partai kecil berpartisipasi dalam parlemen. Ambang batas parlemen juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah dalam *siyasah syar'iyah*. yaitu: 1) Pengambilan keputusan ambang batas tanpa alasan yang tepat; 2) penerapan ambang batas membuang suara sama dengan membuang kesaksian; 3) ambang batas parlemen mengabaikan hak-hak asasi rakyat dalam demokrasi; 4) membatasi golongan atau kelompok minoritas.

Kata Kunci: *Parliamentary Threshold*, Pemilihan Umum, Fiqih Siyasah

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF PARLIAMENTARY THRESHOLD IN
GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF
FIQH SIYASAH**

Writer:

FAIZ FAIDHURRAHMAN
NIM 2111760012

Supervisors:

1. Prof. Dr. H. Rohimin Alwi, M.Ag 2. Dr. Ismail Jalili, M.A

This study aims to solve problems related to the implementation of *parliamentary threshold* in general elections in Indonesia using the perspective of *fiqh siyasah*. A *parliamentary threshold* is the threshold of votes that a political party must obtain to place its representatives in parliament. *Fiqh Siyasah* is the management of general problems for the state with Islamic nuances that ensure the realization of benefit and avoid harm by not violating the provisions of the Shari'a. The research conducted is qualitative with *library research* methods with normative and prescriptive juridical approaches. Data sources are secondary data which means data obtained through literature reviews, laws, court decisions, and other legal sources that support research. Data analyzed with interpretive techniques reveal ontological, epistemological, and axiological essences related to the research objectives. The study found that parliamentary thresholds do not support the spirit of unity and diversity, potentially hinder political aspirations at the local level, and create a condition in which elected members of the People's Representative Council from their regions cannot be representatives of their regions. It is contrary to popular sovereignty, political rights, and rationality, and is related to the interests of major parties to prevent small parties from participating in parliament. The parliamentary threshold is also not in line with the principles and rules in *the siyasah syar'iyah*. namely: 1) Threshold decision making without proper reason; 2) the application of the threshold of casting a vote is equivalent to discarding testimony; 3) parliamentary thresholds ignore people's human rights in a democracy; 4) Limiting minority groups or communities.

Keywords: *Parliamentary Threshold*, General Election, Fiqih Siyasah

التجريد

تطبيق العتبة البرلمانية في الانتخابات العامة في إندونيسيا من منظور الفقه السياسي

مؤلف:

فائز فائض الرحمان

رقم التسجيل: ١٤١٦٢٣٣٤٥٩

ناظر:

١. الأستاذ الدكتور الحاج راحم علوي، الماجستير ٢. الدكتور إسماعيل جليلي، الماجستير

تهدف هذه الدراسة إلى حل المشكلات المتعلقة بتطبيق العتبة البرلمانية في الانتخابات العامة في إندونيسيا باستخدام منظور الفقه السياسي. العتبة البرلمانية هي عتبة الأصوات التي يجب أن يحصل عليها الحزب السياسي لوضع ممثليه في البرلمان. الفقه هو إدارة المشاكل العامة للدولة مع الفروق الإسلامية التي تضمن تحقيق المنفعة وتجنب الضرر من خلال عدم مخالفة أحكام الشريعة. البحث الذي يتم إجراؤه نوعي مع طرق البحث المكتبي مع المناهج القانونية المعيارية والتوجيهية. مصادر البيانات هي بيانات ثانوية تعني البيانات التي تم الحصول عليها من خلال مراجعات الأدبيات والقوانين وقرارات المحاكم والمصادر القانونية الأخرى التي تدعم البحث. تكشف البيانات التي تم تحليلها باستخدام التقنيات التفسيرية عن الجواهر الأنطولوجية والمعرفية والأكسيولوجية المتعلقة بأهداف البحث. ووجدت الدراسة أن العتبات البرلمانية لا تدعم روح الوحدة والتنوع، ويمكن أن تعيق التطلعات السياسية على المستوى المحلي، وتخلق ظروفًا لا يمكن فيها لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين من مناطقهم أن يكونوا ممثلين لمناطقهم. إنه يتعارض مع السيادة الشعبية والحقوق السياسية والعقلانية، ويرتبط بمصالح الأحزاب الكبرى لمنع الأحزاب الصغيرة من المشاركة في البرلمان. كما أن العتبة البرلمانية لا تتماشى مع المبادئ والقواعد في السياسة السيادية وهي: (١) اتخاذ قرار العتبة دون سبب وجيه؛ (٢) تطبيق عتبة الإدلاء بالصوت يعادل تجاهل الشهادة؛ (٣) العتبات البرلمانية تتجاهل حقوق الإنسان للناس في الديمقراطية. (٤) الحد من مجموعات أو مجموعات الأقليات.

الكلمة الأساسية: العتبة البرلمانية، الانتخابات العامة، فقه سياسة